BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan dua simpulan sebagai berikut. Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual-beli melalui media internet meliputi: perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dimulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sampai akibat-akibat yang timbul dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi jual-beli melalui *e-commerce*.

Upaya perlindungan konsumen juga dilakukan dengan pemberian tanggung jawab terhadap pelaku usaha dalam diadakannya kegiatan transaksi. Pelaksanaan perlindungan konsumen juga didukung dengan melibatkan beberapa pihak. Pada saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan dengan melalui media internet atau *e-commerce*. Namun, transaksi dalam *e-commerce* ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu adanya proses jual-beli yang telah dilakukan namun setelah pembayaran, konsumen tidak mendapatkan kuota internet yang dia beli.

Hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila konsumen merasa dirugikan maka konsumen dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

dan konsumen dapat dikenakan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Namun, diharapkan konsumen dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai terlebih dahulu (*win-win solution*).

Kedua, upaya hukum yang dapat digunakan bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam Transaksi Jual-Beli Secara *Online (E-Commerce)* yaitu: Menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang dapat dilakukan terlebih dahulu bila terjadi wanprestasi jika didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya pembeli itu merupakan konsumen yang diberikan perlindungan hukum. Secara garis besar upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa contohnya seperti wanprestasi dalam jual-beli *online* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu litigasi dan non litigasi.

Konsumen juga dapat melakukan pengaduan kepada BPSK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang diharapkan konsumen dan pelaku usaha menyelesaikan permasalahannya melalui cara damai (*win-win solution*). Serta perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini dirasa kurang melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha, karena transaksi jual-beli yang terjadi saat ini adalah transaksi elektronik atau transaksi melalui *e-commerce*.

B. SARAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan dua simpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah memiliki peran yang penting serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan serta pengawasan terhadap diselenggarakannya Undang Undang Perlindungan Konsumen serta perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut.
2. Konsumen harus berhati-hati dalam pembelian secara *online*, agar tidak terjadi wanprestasi. Dimana pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha usaha elektronik (*e-commerce*) yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan